

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SURAKARTA MENURUT PENGELUARAN 2016-2020





# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SURAKARTA MENURUT PENGELUARAN 2016-2020



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KOTA SURAKARTA MENURUT PENGELUARAN  
2016 - 2020**

**ISSN** : 2776-690X  
**Nomor Publikasi** : 33720.2112  
**Katalog** : 9302020.3372  
**Ukuran Buku** : 21 cm x 29,7 cm  
**Jumlah Halaman** : vi + 50 halaman

**Naskah:**

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta

**Penyunting:**

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta

**Penyusun:**

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta

**Gambar Kulit:**

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta

**Diterbitkan Oleh:**

© Badan Pusat Statistik Kota Surakarta

**Dicetak Oleh:**

© Badan Pusat Statistik Kota Surakarta

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KOTA SURAKARTA MENURUT PENGELUARAN  
2016 - 2020**

**Anggota Tim Penyusun :**

Pengarah : Totok Tavirijanto, S.Si

Penanggung Jawab : Dra. M. A. B, Herminawati, MM

Penyunting : Dra. M. A. B, Herminawati, MM

Penulis : Wahyu Pamungkasjati Handayaniingrum, S.ST

Gambar Kulit : Rumpaka Sari Rahmani, S.ST

<https://surakartakota.bps.go.id>



## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. PDRB dapat juga dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang yang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor serta impor, dan sebagainya.

Dalam publikasi ini ditampilkan PDRB Pengeluaran yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*). Melalui pendekatan ini, PDRB dirinci menurut komponen pengeluaran yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori serta Ekspor Impor. Di samping menampilkan angka PDRB Kota Surakarta menurut pengeluaran, publikasi ini juga mengulas sedikit kondisi ekonomi global dan nasional terutama yang terkait dengan PDRB Pengeluaran.

Kami berharap publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak untuk kepentingan pengembangan ekonomi Kota Surakarta khususnya, baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun dunia usaha dan masyarakat.

Surakarta, 29 April 2021  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
Kota Surakarta,

**Totok Tavirijanto, S.Si**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) .....	2
B. KEGUNAAN PDRB .....	3
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA .....	4
A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT) .....	5
B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT) .....	7
C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP) .....	9
D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) .....	11
E. PERUBAHAN INVENTORI .....	14
F. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA .....	17
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA SURAKARTA BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2016 – 2020 .....	19
A. TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA SURAKARTA MENURUT PENGELUARAN .....	20
B. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA .....	25
C. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT .....	26
D. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH .....	27
E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB) .....	28
F. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI .....	29
G. PERKEMBANGAN EKSPOR IMPOR ANTAR DAERAH .....	31
BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 – 2020 .....	33
A. PDRB (NOMINAL) .....	34
B. PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR .....	35
C. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB .....	36
D. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB .....	37
E. PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB .....	37
F. PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR .....	38
G. KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN .....	39
BAB V PENUTUP .....	41
LAMPIRAN .....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	49



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Menurut Pengeluaran ADHB Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah) .....	20
Tabel 2	PDRB Menurut Pengeluaran ADHK 2010 Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah) .....	21
Tabel 3	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran ADHB Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020 (Persen) .....	22
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK 2010 Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020 (Persen) .....	24
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 (Persen) .....	25
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 .....	26
Tabel 7	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020 .....	27
Tabel 8	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 ...	28
Tabel 9	Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 .....	29
Tabel 10	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020 .....	30
Tabel 11	Perkembangan Ekspor dan Impor antar Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 .....	32
Tabel 12	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per kapita Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 .....	34
Tabel 13	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 .....	35
Tabel 14	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 ...	36
Tabel 15	Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 .....	37
Tabel 16	Rasio Ekspor terhadap PMTB Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 .....	38
Tabel 17	Rasio PDRB terhadap Impor Tahun Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 .....	39
Tabel 18	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 .....	39

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan PDRB Menurut Pengeluaran ADHB dan ADHK 2010 Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah) .....	22
Grafik 2	Perbandingan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 (Persen) .....	23
Grafik 3	Pertumbuhan beberapa Komponen Pengeluaran ADHB Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 (Persen) .....	31

<https://surakartakota.bps.go.id>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	PDRB Menurut Pengeluaran ADHB Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 (Milyar Rupiah) ....	44
Lampiran 2.	PDRB Menurut Pengeluaran ADHK 2010 Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 (Milyar Rupiah) .....	44
Lampiran 3.	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran ADHB Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 (Persen) .	45
Lampiran 4.	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran ADHK 2010 Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 (Persen) .....	45
Lampiran 5.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHB Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 (Persen) .....	46
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK 2010 Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 (Persen) .....	46
Lampiran 7.	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 (Persen) .....	47
Lampiran 8.	Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 (2010 = 100) .....	47
Lampiran 9.	Laju Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020 (Persen) .....	48

<https://surakartakota.bps.go.id>

# ***BAB I***

## ***PENDAHULUAN***

<https://surakartakota.bps.go.id>

## A. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu, baik ADHB maupun ADHK. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah Tahun 2010 yang diharapkan dapat mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu :

### 1. Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Beberapa kategori lapangan usaha tersebut dapat dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

### 2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendapatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/daerah/*region* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

### 3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non

profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tidak langsung neto.

## B. KEGUNAAN PDRB

Perangkat data pendapatan regional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari perangkat data ini antara lain adalah :

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah/*region*. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
2. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, atau setiap sektor, dari tahun ke tahun;
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/daerah/*region*. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah/*region*;
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran dapat menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/luar wilayah;
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan institusi dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi;
6. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk;
7. PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

## ***BAB II***

### ***METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA***

<https://surakartakota.bps.go.id>



## A. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Selain berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sebagai berikut :

- a. Makanan dan minuman tidak beralkohol;
- b. Minuman beralkohol, tembakau, dan narkotik;
- c. Pakaian dan alas kaki;
- d. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya;
- e. Furnitur, perlengkapan rumahtangga, dan pemeliharaan rutin;
- f. Kesehatan;
- g. Angkutan;
- h. Komunikasi;
- i. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan;
- j. Pendidikan;
- k. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel;
- l. Barang dan jasa lainnya.

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian pada publikasi ini, 12 (dua belas) COICOP tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) COICOP, yaitu :

- a. Makanan, Minuman, dan Rokok;
- b. Pakaian dan Alas Kaki;
- c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga;
- d. Kesehatan dan Pendidikan;
- e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya;
- f. Hotel dan Restoran;
- g. Lainnya.

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut :

1) Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*)

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer);

2) Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;

3) Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;

4) Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu :

1) Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut;

2) Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga;

3) Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga

Contoh : pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah dan pembelian rumah;

4) Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

## 2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan;

b. Jumlah penduduk pertengahan tahun;

c. Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;

d. Indeks Harga Konsumen (IHK);

e. Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data

indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas, menghasilkan besarnya PKRT ADHB (ADHB). PKRT ADHK (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara menipiskan (*deflate*) PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut :

- a. Estimasi PKRT hasil Susenas :
  - 1) Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu  $\times (30/7) \times 12 \times$  jumlah penduduk pertengahan tahun
  - 2) Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan  $\times 12 \times$  jumlah penduduk pertengahan tahun;
- b. Terhadap data poin "a" dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
- c. Data poin "b" dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok COICOP;
- d. Diperoleh nilai PKRT Tahun 2010 yang telah disesuaikan (*adjust*);
- e. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Kota/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
- f. PKRT ADHK 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin "d" dengan hasil poin "e".

## B. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PKLNPRT)

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tidak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- a. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- b. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- c. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;

- d. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus dan;
- e. Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 6 (enam) jenis lembaga, yaitu Organisasi kemasyarakatan; Organisasi sosial; Organisasi profesi dan sserikat buruh; Organisasi kebudayaan, olahraga, dan rekreasi; Partai politik; serta Lembaga keagamaan.

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, biaya fotokopi, dan sejenisnya; pembayaran listrik, air, telepon, faksimili, dan internet; biaya rapat, seminar, perjamuan, dan sejenisnya; jasa bank (biaya administrasi dan transfer melalui bank); biaya transport dan bahan bakar (termasuk perjalanan dinas); belanja barang dan jasa lainnya; biaya sewa, perbaikan kecil dan pemeliharaan (gedung, perlengkapan dan peralatan kantor, alat transportasi, komunikasi, dsb); dan lain-lain;
- b. Kompensasi pengurus/tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya;
- c. Biaya penyusutan;
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

## 2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKLNPRT adalah :

- a. Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP)  
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran;
- b. Hasil *up-dating* direktori LNPRT  
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga;
- c. Indeks Harga Konsumen (IHK).

PKLNPRT diestimasi dengan metode langsung, yaitu menggunakan hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut :

- 1) Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai

harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$  : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran;

$x_{ij}$  : PKLNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran;

$n_i$  : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga;

$i$  : Jenis lembaga LNPRT,  $i = 1, 2, 3, \dots, 7$ ;

$j$  : jenis pengeluaran LNPRT,  $j = 1, 2, 3, \dots, 19$ .

2) Mengestimasi PKLNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

$X$  : PKLNPRT ADHB;

$N_i$  : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRTADHB. PKLNPRT ADHK 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKLNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

## C. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PKP)

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu pemerintahan. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga; sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya; mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer; serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa

akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin; pembayaran upah dan gaji pegawai; transfer sosial dalam bentuk barang; perkiraan penyusutan barang modal dan nilai output dari Bank Indonesia; dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut :

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh: aktivitas pencetakan publikasi dan kartu pos; reproduksi karya seni; pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah;
- b. Memproduksi jasa. Contoh: aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah; perguruan tinggi; museum; perpustakaan; tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Kota, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kota mencakup PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kota, PK-Pemerintah Kota yang bersangkutan, PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kota, dan PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kota bersangkutan.

## 2. Metode Penghitungan

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kota Tahunan adalah :

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu);
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu);
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS);
- d. Output Bank Indonesia (BI);
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

## 1) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Kota ADHB

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar-penjualan barang dan jasa} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa; bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar); belanja pegawai dan penyusutan.

Untuk level Kota, PK-P Kota ADHB dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kota itu sendiri ditambah pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kota yang ada di wilayah Kota tersebut termasuk pengeluaran akhir seluruh pemerintah Kelurahan yang ada di wilayah Kota tersebut dan pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Kota yang bersangkutan.

## 2) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) Kota ADHK

Pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) Kota ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi (penipisan/penurunan). *Deflator* (alat/data untuk menipiskan/menurunkan) yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor; Indeks Upah; Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto; dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

## D. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah pemerintahan. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti : bangunan dan konstruksi lain; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan; ternak dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan; pembuatan; pembelian; sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri; serta

barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal); dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan; transfer atau barter; dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

**PMTB terdiri dari :**

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas (seperti : bangunan tempat tinggal; bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya; mesin & perlengkapan; alat transportasi; aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*); produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*); dan sebagainya);
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi (seperti lahan dan aset yang dipatenkan);
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti : pemeriksaan mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

## 2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah :

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Kota;
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat;
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level Kota);
- d. Laporan keuangan perusahaan;
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level Kota;
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar;
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalan (migas dan non-migas);
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum;
- i. Publikasi Statistik Konstruksi;
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing.



Pendekatan langsung dilakukan dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung dilakukan dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan arus komoditas. Dalam hal ini penyediaan atau *supply* dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

### **Pendekatan Langsung**

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian (termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti : biaya transportasi; biaya instalasi; pajak-pajak; serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut). Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/ data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADHB atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK, maka PMTB ADHB tersebut di "*deflate*" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

### **Pendekatan Tidak Langsung**

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan membagi PMTB (ADHB) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "*ekstrapolasi*" atau mengalikan PMTB ADHK dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK tersebut di "*reflate*" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini menggunakan syarat ketersediaan PMTB ADHK di tahun-tahun sebelumnya secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

*Pertama*, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan, dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADHK adalah dengan cara membagi PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHKnya diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADHK diperoleh dengan membagi nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan antara lain nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHKnya diperoleh dengan cara membagi nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu :

- 1) Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar;
- 2) Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh;
- 3) Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

## E. PERUBAHAN INVENTORI

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Tetap Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan

penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang mempunyai nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan dan;
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir dan gandum.

## 2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- a. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait, dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- c. Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- e. Data komoditas perkebunan;
- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih dan;
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- h. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian.

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

### **Pendekatan Langsung**

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADHB, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- 1) menghitung posisi inventori ADHK, dengan cara membagi stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- 2) menghitung perubahan inventori ADHK dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya dan;
- 3) menghitung perubahan inventori ADHB dengan mengalikan perubahan inventori ADHK dengan IHPB rata-rata tahunan.

### **Pendekatan Tidak Langsung**

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang

inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan, bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHB dihitung dengan cara : a. membagi nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai; b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah :

- 1) Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- 2) Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- 3) Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- 4) Diperlukan penyesuaian dengan cara menambah nilai, untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

## F. EKSPOR IMPOR BARANG DAN JASA

### 1. Konsep, Definisi dan Cakupan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta perbedaan harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari :

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari Kota tersebut;
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari Kota tersebut.

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya :

- a. Net Ekspor antar daerah;
- b. Ekspor antar daerah;
- c. Impor antar daerah.

## 2. Metode Penghitungan

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi ekspor impor adalah :

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$);
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$);
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari Bank Indonesia;
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk Kota di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk Kota dari hasil survei;
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

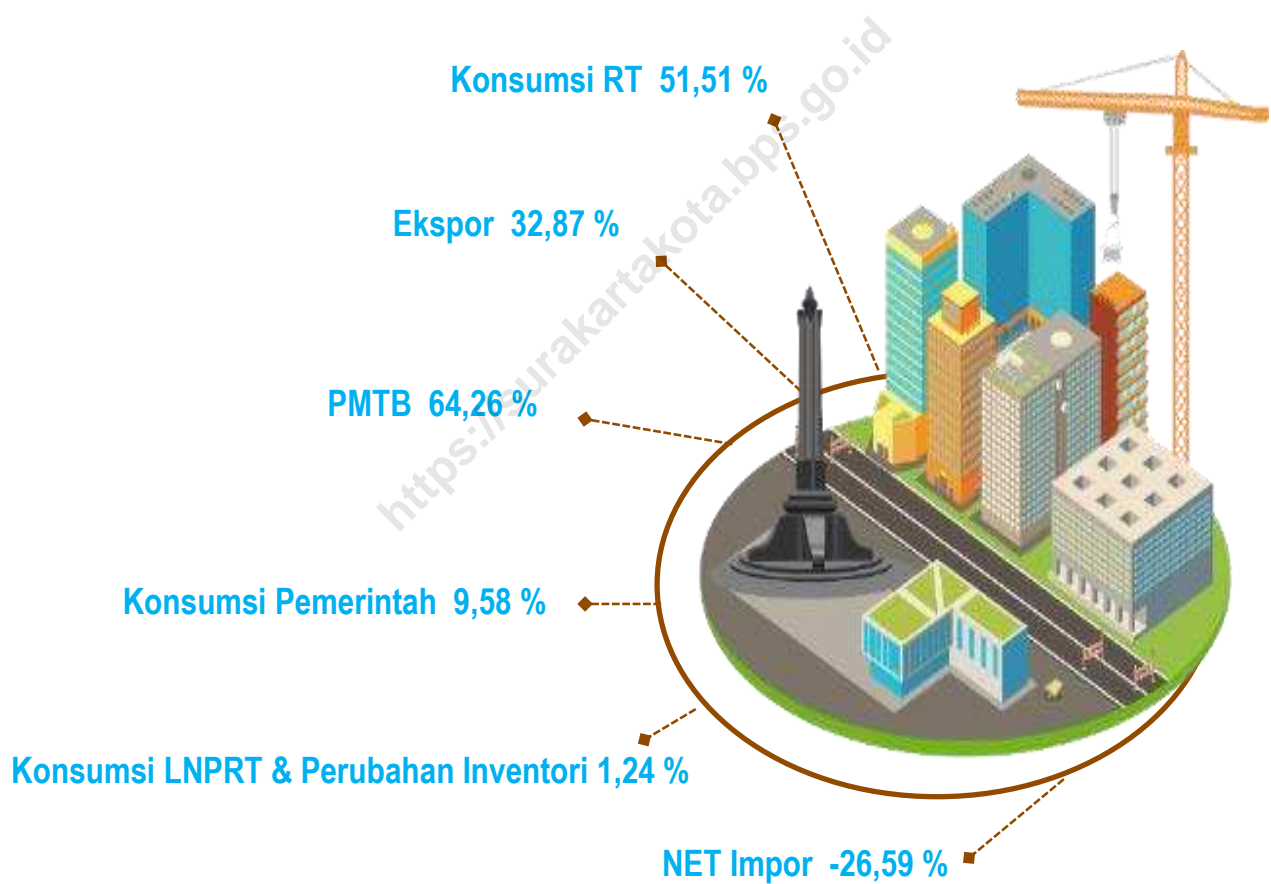
Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu, nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

**BAB III**

**TINJAUAN PEREKONOMIAN**

**KOTA SURAKARTA BERDASARKAN**

**PDRB PENGELUARAN TAHUN 2016 - 2020**



Perubahan struktur ekonomi Kota Surakarta akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2016 sampai dengan 2020, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Surakarta digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

## A. TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA SURAKARTA MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kota Surakarta menunjukkan adanya kontraksi akibat pandemi COVID-19 di sepanjang Tahun 2020. Hal ini terlihat dari arah negatif pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai PDRB ADHB (ADHB) dan ADHK (ADHK), serta pertumbuhan pada total PDRB yang nampak dari beberapa komponen seperti Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, PMTB, dan Ekspor.

**Tabel 1. PDRB Menurut Pengeluaran ADHB  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020  
(Juta Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	19 200 583,42	20 827 423,56	22 587 793,70	24 210 990,22	24 540 847,18
2. Konsumsi LNPRT	230 089,31	250 107,05	278 345,22	312 574,49	291 069,37
3. Konsumsi Pemerintah	4 386 329,29	4 703 108,42	4 873 871,64	5 090 821,49	4 566 198,15
4. PMTB	25 547 155,52	27 798 722,07	31 167 732,46	33 871 412,04	30 617 430,67
5. Perubahan Inventori	87 847,83	142 547,72	315 136,44	292 012,26	300 062,23
6. Ekspor	12 318 894,80	14 343 574,21	17 100 635,39	18 444 114,95	15 662 370,73
7. Impor	23 999 834,05	27 023 143,55	31 893 697,90	34 219 649,46	28 333 414,67
Total PDRB	37 771 066,12	41 042 339,48	44 429 816,95	48 002 275,99	47 644 563,66

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Nilai Total PDRB Kota Surakarta ADHB selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan menurun pada Tahun 2020. Peningkatan dan penurunan nilai total PDRB tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga pada tingkat



konsumen dan juga perubahan volume konsumsi. Penurunan nilai Total PDRB Kota Surakarta ADHB Tahun 2020 dipengaruhi oleh terjadinya pandemi COVID-19 dan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemi COVID-19 berlangsung.

**Tabel 2. PDRB Menurut Pengeluaran ADHK 2010**  
**Kota Surakarta**  
**Tahun 2016 - 2020**  
*(Juta Rupiah)*

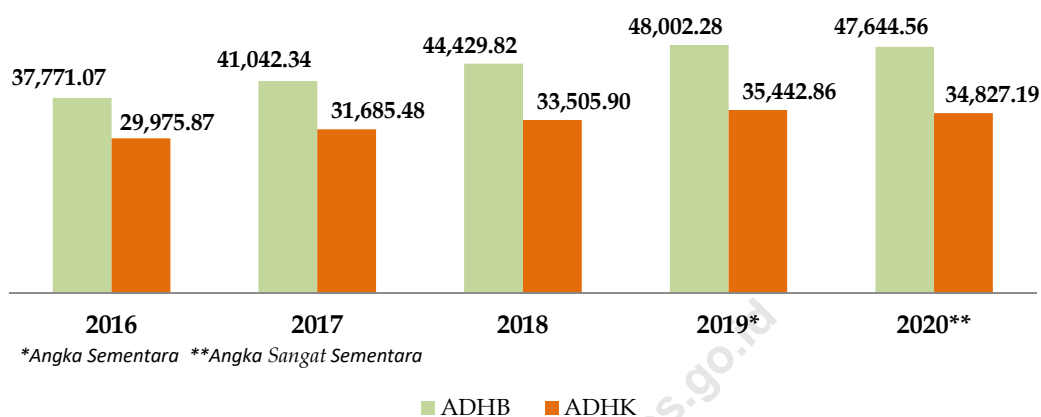
<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	14 612 124,07	15 358 023,64	16 270 070,21	16 979 006,09	17 003 154,69
2. Konsumsi LNPRT	158 422,53	167 683,58	182 143,33	200 367,52	181 793,45
3. Konsumsi Pemerintah	2 879 220,86	2 995 645,83	3 048 516,76	3 158 638,18	2 854 985,43
4. PMTB	19 387 624,93	20 671 443,29	22 507 256,6	23 634 469,01	21 347 616,35
5. Perubahan Inventori	118 901,02	120 655,61	122 247,38	123 066,24	230 163,62
6. Ekspor	8 310 850,64	8 978 798,93	9 947 394,58	10 505 194,70	9 224 980,32
7. Impor	15 491 271,04	16 606 770,42	18 571 728,2	19 157 885,67	16 015 505,57
<b>Total PDRB</b>	<b>29 975 873,01</b>	<b>31 685 480,46</b>	<b>33 505 900,66</b>	<b>35 442 856,07</b>	<b>34 827 188,29</b>

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada Tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2016 - 2020, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Surakarta berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 2 di atas. Selama periode Tahun 2016 - 2019 seluruh komponen mengalami kenaikan. Tetapi ada sedikit perubahan fenomena di Tahun 2020, dimana hanya komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Perubahan Inventori yang mengalami peningkatan sementara komponen pengeluaran yang lain mengalami penurunan.

Dari Grafik 1 berikut, nampak bahwa nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK pengaruh harga telah diiadakan.

**Grafik 1. Perbandingan PDRB Menurut Pengeluaran  
ADHB dan ADHK 2010  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020  
(Juta Rupiah)**



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPR), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, serta ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran ADHB  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020  
(Persen)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	50,83	50,75	50,84	50,44	51,51
2. Konsumsi LNPRT	0,61	0,61	0,63	0,65	0,61
3. Konsumsi Pemerintah	11,61	11,46	10,97	10,61	9,58
4. PMTB	67,64	67,73	70,15	70,56	64,26
5. Perubahan Inventori	0,23	0,35	0,71	0,61	0,63
6. Ekspor	32,61	34,95	38,49	38,42	32,87
7. Impor	63,54	65,84	71,78	71,29	59,47
<b>Total PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

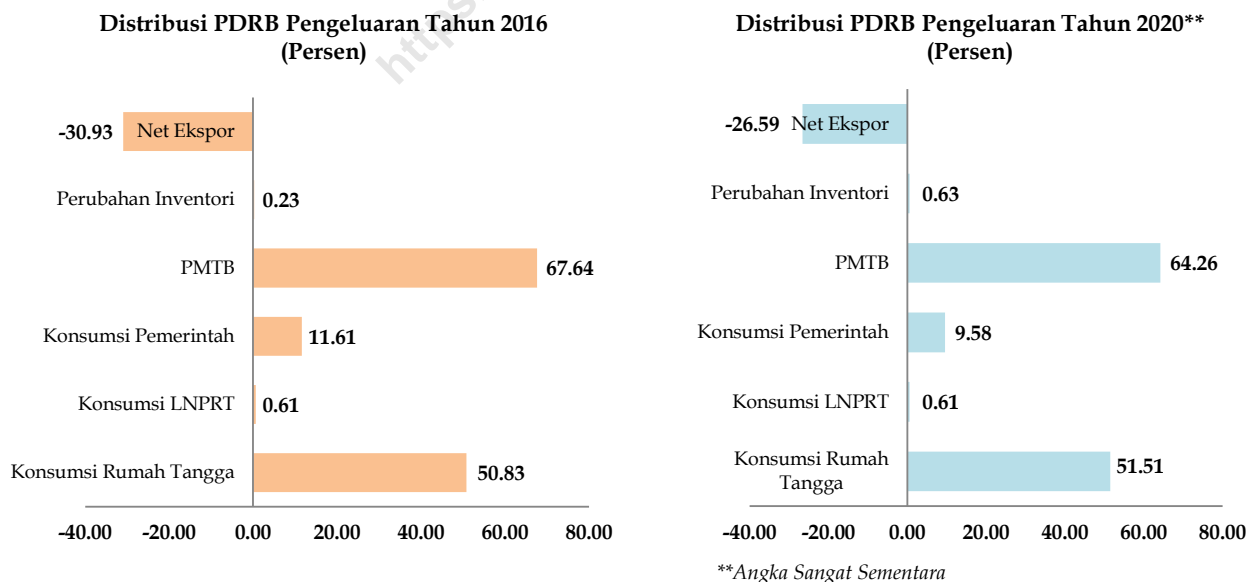
\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode Tahun 2016 - 2020, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik hampir sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50,44 persen). Persentase konsumsi rumah tangga mengalami penurunan dari Tahun 2016 dan meningkat pada Tahun 2020. Kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga disebabkan adanya pandemi COVID-19 sejak Bulan Maret 2020. Dalam rangka menekan dampak COVID-19 kepada masyarakat, pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mengakibatkan perubahan pola, baik pola hidup masyarakat maupun pola aktivitas ekonomi.

Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, pada periode Tahun 2016 - 2020 sebesar 32,61 - 38,49 persen produk Kota Surakarta didistribusikan ke luar daerah Kota Surakarta. Demikian halnya dengan impor mempunyai peran yang relatif besar, karena sebesar 59,47 - 71,78 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari luar Kota Surakarta selama Tahun 2016 - 2020.

Pengeluaran untuk kapital (PMTB) pada periode Tahun 2016 - 2020 memberi kontribusi sebesar 64,26 - 70,56 persen, sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 9,58-11,61 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

**Grafik 2. Perbandingan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kota Surakarta Tahun 2016 dan Tahun 2020 (Persen)**



Pada Tahun 2016 - 2020 perdagangan Kota Surakarta yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor, yang berarti bahwa perdagangan Kota Surakarta selalu menunjukkan posisi “defisit”. Hal ini dapat dilihat melalui Perbandingan distribusi PDRB menurut pengeluaran Tahun 2016 dan Tahun 2020 yang ditampilkan pada Grafik 2 di atas.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK 2010  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020  
(Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,81	5,10	5,94	4,36	0,14
2. Konsumsi LNPRT	5,42	5,85	8,62	10,01	-9,27
3. Konsumsi Pemerintah	-2,96	4,04	1,76	3,61	-9,61
4. PMTB	5,98	6,62	8,88	5,01	-9,68
5. Perubahan Inventori	10,64	1,48	1,32	0,67	87,02
6. Ekspor	2,09	8,04	10,79	5,61	-12,19
7. Impor	1,37	7,20	11,83	3,16	-16,40
<b>Total PDRB</b>	<b>5,35</b>	<b>5,70</b>	<b>5,75</b>	<b>5,78</b>	<b>-1,74</b>

*\*Angka Sementara    \*\*Angka Sangat Sementara*

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dari Tahun 2016 - 2020 secara rata-rata mencapai 4,17 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,35 persen (2016), 5,70 persen (2017), 5,75 persen (2018), 5,78 persen (2019), dan -1,74 persen (2020). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 5,78 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 (-1,74 persen) akibat pandemi COVID-19.

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020  
(Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	131,40	135,61	138,83	142,59	144,33
2. Konsumsi LNPRT	145,24	149,15	152,82	156,00	160,11
3. Konsumsi Pemerintah	152,34	157,00	159,88	161,17	159,94
4. PMTB	131,77	134,48	138,48	143,31	143,42
5. Perubahan Inventori	73,88	118,14	257,79	237,28	130,37
6. Ekspor	148,23	159,75	171,91	175,57	169,78
7. Impor	154,92	162,72	171,73	178,62	176,91
<b>Total PDRB</b>	<b>126,00</b>	<b>129,53</b>	<b>132,60</b>	<b>135,44</b>	<b>136,80</b>

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

## B. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar nilai PDRB (terdiri dari produk domestik dan produk impor) menurut pengeluaran digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2020 total konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga.

Proporsi total pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yaitu 50,84 persen dan titik terendah terjadi pada Tahun 2019 yaitu 50,44 persen. Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 dan menurun di Tahun 2020 menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan.

Pada Tahun 2016 konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 37,34 juta rupiah, yang artinya setiap penduduk Kota Surakarta rata-rata mengeluarkan biaya sebesar 37,34 juta rupiah selama setahun untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pengeluaran tersebut terus meningkat setiap tahun hingga pada Tahun 2020 rata-rata konsumsi per kapita mencapai 47,09 juta rupiah.

Apabila dilihat menurut harga konstan, pertumbuhan konsumsi per kapita Kota Surakarta selama Tahun 2016 - 2020 berada pada kisaran -0,14 - 5,57 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 5,57 persen dan terendah sebesar -0,14 persen pada Tahun 2020.

**Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020**

<b>U r a i a n</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB ( <i>Juta Rp</i> )	19 200 583,42	20 827 423,56	22 587 793,70	24 210 990,22	24 540 847,18
b. ADHK 2010 ( <i>Juta Rp</i> )	14 612 124,07	15 358 023,64	16 270 070,21	16 979 006,09	17 003 154,69
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	50,83	50,75	50,84	50,44	51,51
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun ( <i>Ribu Rp</i> )					
a. ADHB	131 974,56	142 621,35	154 142,91	164 679,33	166 445,20
b. ADHK 2010	100 435,94	105 168,17	111 029,70	115 488,56	115 321,75
Rata-rata konsumsi per-kapita/ tahun ( <i>Ribu Rp</i> )					
a. ADHB	37 342,80	40 355,27	43 615,29	46 596,61	47 096,40
b. ADHK 2010	28 418,80	29 757,73	31 416,26	32 677,89	32 630,79
Pertumbuhan <sup>1)</sup> (% ADHK)					
a. Total konsumsi Rumah Tangga	5,73	8,47	8,45	7,19	1,36
b. Per-Rumah Tangga	3,41	4,71	5,57	4,02	-0,14
c. Perkapita	3,41	4,71	5,57	4,02	-0,14
Jumlah rumah tangga ( <i>unit</i> )	145 487	146 033	146 538	147 019	147 441
Jumlah penduduk ( <i>orang</i> )	514 171	516 102	517 887	519 587	521 077

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Jumlah Rumah Tangga & Jumlah Penduduk : Proyeksi Penduduk SP 2010

<sup>1)</sup>Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK sebesar 5,73 persen pada Tahun 2016. Kemudian, berfluktuasi pada empat tahun berikutnya yaitu meningkat pada Tahun 2017 sebesar 8,47 persen, kemudian menurun menjadi 8,45 persen (2018), 7,19 persen (2019), hingga menjadi 1,36 persen (2020).

### C. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu masih kurang dari 1 (satu) persen. Hal

ini menunjukkan bahwa peranan LNPRT dalam perekonomian suatu wilayah masih dapat ditingkatkan lagi. Beberapa lembaga yang memberikan andil cukup besar untuk PKLNPRT adalah organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga keagamaan, dan organisasi sosial.

**Tabel 7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 – 2020**

<b>U r a i a n</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	230,09	250,11	278,35	312,57	291,07
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	158,42	167,68	182,14	200,37	181,79
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,61	0,61	0,63	0,65	0,61
Pertumbuhan (% ADHK)	5,42	5,85	8,62	10,01	-9,27

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan konsumsi LNPRT dari Tahun 2016 hingga Tahun 2019 terus meningkat, sedangkan Tahun 2020 mengalami kontraksi hingga negatif 9,27 persen. Pertumbuhan Tahun 2020 menurun karena dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang memunculkan kebijakan yaitu pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemi COVID-19, sehingga kegiatan dan sumbangan yang bersifat kemasyarakatan berkurang drastis.

#### **D. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH**

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan konsumsi akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian pada suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Surakarta ditampilkan pada Tabel 8.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan dari Tahun 2016 hingga Tahun 2019 dan menurun pada Tahun 2020, baik untuk ADHB maupun ADHK 2010. Penurunan pengeluaran pemerintah pada Tahun 2020 karena ada penghematan dan *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19.

Pada Tahun 2016 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 4,386 triliun rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada Tahun 2019 nilainya mencapai 5,090 triliun rupiah. Kemudian pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4,566 triliun rupiah.

Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga mengalami peningkatan dari Tahun 2016 hingga Tahun 2019, kemudian turun pada Tahun 2020. Hal ini

mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas dari Tahun 2016 sampai Tahun 2019 serta penurunan yang terjadi pada Tahun 2020.

**Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020**

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	4 386,33	4 703,12	4 873,87	5 090,82	4 566,20
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	2 879,22	2 995,65	3 048,52	3 158,64	2 854,99
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	11,61	11,46	10,97	10,61	9,58
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	8 530,88	9 112,75	9 411,07	9 797,82	8 763,00
b. ADHK 2010	5 599,73	5 804,37	5 886,45	6 079,13	5 479,01
Pertumbuhan <sup>1)</sup> (% ADHK)					
a. Total konsumsi pemerintah	-0,12	6,82	3,27	4,11	-10,56
b. Konsumsi perkapita	-3,33	3,65	1,41	3,27	-9,87
Jumlah penduduk ( <i>orang</i> )	514 171	516 102	517 887	519 587	521 077

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Jumlah Penduduk : Proyeksi Penduduk SP 2010

<sup>1)</sup>Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010

Pertumbuhan total konsumsi pemerintah pada Tahun 2018 sebesar 3,27 persen dengan pertumbuhan konsumsi per kapita sebesar 1,41 persen karena adanya penghematan anggaran oleh pemerintah dan penerapan *e-budgeting* melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) secara ketat serta transparansi anggaran melalui *website* e-budget.surakarta.go.id, apbd.surakarta.go.id, dan Laporan Keuangan dalam ppid.surakarta.go.id.

## E. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital).



Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect-input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data pada Tabel 9 berikut ini menjelaskan bahwa total PMTB baik ADHB maupun ADHK mengalami kenaikan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 dan mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2020. Hal ini disebabkan juga karena adanya perlambatan karena penghentian sementara proyek-proyek pembangunan fisik selama masa pandemi COVID-19 berlangsung akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penataan ulang kembali anggaran.

**Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	25 547,16	27 798,72	31 167,73	33 871,41	30 617,43
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	19 387,62	20 671,44	22 507,26	23 634,47	21 347,62
Proporsi PMTB terhadap PDRB (% ADHB)	67,64	67,73	70,15	70,56	64,26
Laju PMTB	5,98	6,62	8,88	5,01	-9,68

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Proporsi PMTB terhadap PDRB terendah masih berada pada angka 64,26 persen meskipun Kota Surakarta sedang dalam masa terdampak pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik di Kota Surakarta berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Sementara itu pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 berfluktuasi dari 5,98 persen (2016) meningkat menjadi 8,88 persen (2018) dan kembali turun hingga -9,68 persen (2020) yang menunjukkan bahwa mulai adanya pengalihan pembangunan selain fisik di Kota Surakarta pada Tahun 2019 dan adanya imbas dari pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2020.

## F. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen perubahan inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen perubahan inventori adalah proporsi dalam PDRB yang umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun arahnya (positif atau negatif).

**Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Perubahan Inventori					
a. ADHB ( <i>Miliar Rp</i> )	87,85	142,55	315,14	292,01	300,06
b. ADHK 2010 ( <i>Miliar Rp</i> )	118,90	120,66	122,25	123,07	230,16
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,23	0,35	0,71	0,61	0,63

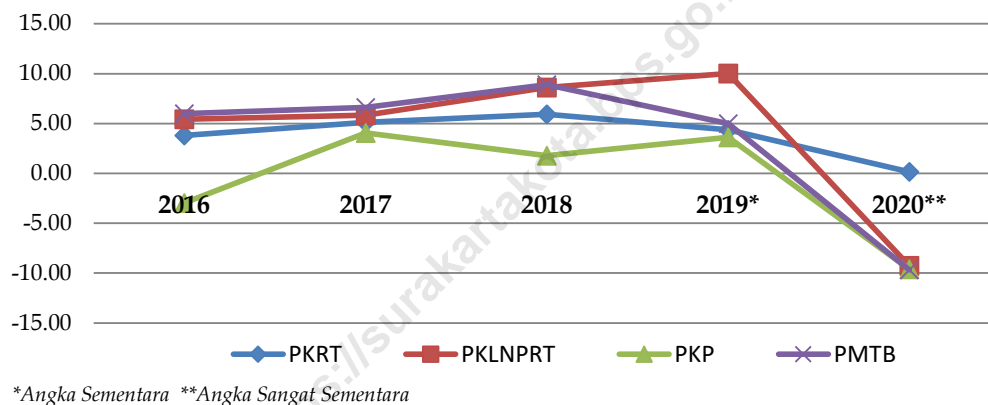
\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 proporsinya sebesar 0,23 persen, terendah dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2020, dan tertinggi sebesar 0,71 persen pada Tahun 2018. Meskipun proporsi perubahan inventori pada Tahun 2020 tidak setinggi pada Tahun 2018, namun masih menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan proporsi pada Tahun 2019 yang berarti meskipun ada penumpukan bahan dan barang di gudang, namun nampak masih ada kontrol terhadap keberlangsungan kegiatan perekonomian selama masa pandemi COVID-19.

Hal lain yang sedikit dapat dijelaskan dari semakin meningkatnya total nilai perubahan inventori baik berdasarkan ADHB maupun ADHK dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 adalah para pelaku ekonomi di Kota Surakarta yang juga banyak berada pada skala menengah dan besar sehingga baik berlaku sebagai produsen maupun distributor, para pelaku ekonomi tersebut akan selalu memiliki gudang yang biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan baku, bahan setengah jadi, maupun produk akhir termasuk *display* (pajangan) penjualan. Sehingga mengulas tentang perubahan inventori berarti juga membahas tentang perubahan persediaan.

Grafik 3 berikut ini memberikan gambaran mengenai pertumbuhan beberapa komponen pengeluaran (PKRT, PKLNPRT, PKP, dan PMTB) berdasarkan ADHB. Sehingga dapat dilihat bahwa ada pertumbuhan secara positif dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Pengeluaran Konsumsi lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PKLNPRT), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) yang justru menunjukkan pertumbuhan ke arah negatif. Pada Tahun 2019 keempat komponen menunjukkan pertumbuhan yang lebih positif dan masing-masing komponen tersebut mengalami kontraksi tajam hingga minus di Tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 selain komponen PKRT.

**Grafik 3. Pertumbuhan beberapa Komponen Pengeluaran ADHB  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020  
(Persen)**



## G. PERKEMBANGAN EKSPOR IMPOR ANTAR DAERAH

Ekspor didefinisikan sebagai proses penjualan barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah yang lain. Sedangkan pembelian barang dan jasa oleh suatu daerah dari daerah lain disebut impor. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang serta jasa ke dan dari luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan komponen ekspor-impor antar Kabupaten/Kota (dalam series PDRB tahun dasar 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross-hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian.

Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

**Tabel 11. Perkembangan Ekspor dan Impor antar Daerah  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor dan Impor (ADHB)					
a. Ekspor (Miliar Rp)	12 318,89	14 343,57	17 100,64	18 444,11	15 662,37
b. Impor (Miliar Rp)	23 999,83	27 023,14	31 893,70	34 219,65	28 333,41
Nilai Ekspor dan Impor (ADHK)					
a. Ekspor (Miliar Rp)	8 310,85	8 978,80	9 947,40	10 505,19	9 224,98
b. Impor (Miliar Rp)	15 491,27	16 606,77	18 571,73	19 157,89	16 015,51

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 11 di atas dapat dilihat gambaran perkembangan nilai ekspor dan impor antar daerah, yaitu ekspor Kota Surakarta ke Kabupaten/Kota lain serta impor dari Kabupaten/Kota lain. Terlihat bahwa nilai ekspor antar daerah selalu lebih kecil dibanding nilai impornya.

Nilai ekspor yang terus meningkat dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 mengalami penurunan di Tahun 2020 karena adanya pembatasan pengiriman ekspor. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemi COVID-19 memberikan dampak pada sektor transportasi dan pergudangan yang memiliki peranan penting dalam proses distribusi ekspor. Hal ini juga terlihat dari nilai impor yang menurun searah dengan nilai ekspor baik berdasarkan ADHB maupun ADHK.

# ***BAB IV***

## ***PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB***

### ***MENURUT PENGELUARAN***

#### ***KOTA SURAKARTA***

##### ***TAHUN 2016 - 2020***

<https://surakartakota.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

## A. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita.

**Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per kapita  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 – 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB ( <i>Milyar Rupiah</i> )					
- ADHB	37 771,07	41 042,34	44 429,82	48 002,28	47 644,56
- ADHK 2010	29 975,87	31 685,48	33 505,90	3 5442,86	34 827,19
PDRB perkapita ( <i>Ribu Rupiah</i> )					
- ADHB	73 460,16	79 523,70	85 790,56	92 385,44	91 434,79
- ADHK 2010	58 299,42	61 393,83	64 697,32	68 213,52	66 836,93
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	4,95	5,31	5,38	5,43	-2,02
Jumlah penduduk ( <i>orang</i> )	514 171	516 102	517 887	519 587	521 077
Pertumbuhan Penduduk	0,38	0,38	0,35	0,33	0,29

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara  
Jumlah Penduduk : Proyeksi Penduduk SP 2010

Berdasarkan Tabel 12 di atas, PDRB per kapita Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 dan mengalami penurunan di Tahun 2020. Selain karena kondisi pandemi COVID-19 pada Tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Surakarta juga terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya penduduk Kota Surakarta juga terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Tahun 2020.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” meningkat di kisaran 4,95 persen hingga 5,43 persen pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 dan menurun hingga minus 2,02 persen di Tahun 2020. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan per kapita selain dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan penduduk.

## B. PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Tabel 13 berikut ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kota Surakarta (di atas 50 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kota Surakarta sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya juga sudah termasuk sebagian produk yang berasal dari impor.

**Tabel 13. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Konsumsi RT (ADHB) (Milyar Rupiah)	19 200,58	20 827,42	22 587,80	24 210,99	24 540,85
Total Nilai Ekspor (ADHB) (Milyar Rupiah)	12 318,89	14 343,57	17 100,64	18 444,11	15 662,37
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,56	1,45	1,32	1,31	1,57

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Dari data di atas tampak bahwa pada Tahun 2016 produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 1,56 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga sebelum dilakukan pendistribusian untuk pemenuhan permintaan konsumsi di luar Kota Surakarta. Hal tersebut juga tampak dari total nilai konsumsi rumah tangga dan total nilai ekspor yang dalam kondisi normal, meskipun nilai ekspor setiap tahun meningkat, namun kenaikannya tidak lebih tinggi daripada peningkatan konsumsi rumah tangga.

Hal lain yang dapat dijelaskan dari Tabel 13 adalah rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor berfluktuatif dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Rasio mengalami penurunan di Tahun 2017 menjadi sebesar 1,45 hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 1,31 dan kemudian meningkat pada Tahun 2020 menjadi sebesar 1,57.

Peningkatan rasio di Tahun 2020 lebih disebabkan peningkatan konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi karena pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemi COVID-19. Sementara itu, secara implisit, data tersebut menjelaskan bahwa peningkatan nilai konsumsi akhir rumah tangga maupun ekspor dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 disebabkan oleh perubahan volume maupun harga.

### C. PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio dari perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap) dapat dilihat sebagai indikasi kesetaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara fisik maupun secara sosial. Perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan PMTB Kota Surakarta tersaji pada Tabel 14 berikut ini.

Dari Tabel 14 berikut dapat dilihat bahwa rata-rata rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB selama lima tahun terakhir sebesar 0,75. Hal ini dapat diartikan penggunaan produk untuk konsumsi rumah tangga 0,75 kali dari PMTB.

**Tabel 14. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020**

<b>U r a i a n</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Milyar Rupiah)	19 200,58	20 827,42	22 587,80	24 210,99	24 540,85
Total PMTB (ADHB) (Milyar Rupiah)	25 547,16	27 798,72	31 167,73	33 871,41	30 617,43
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	0,75	0,75	0,72	0,71	0,80

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Nilai ini cenderung menurun selama lima tahun terakhir kecuali pada Tahun 2020, terjadi peningkatan dari 0,71 pada Tahun 2019 menjadi 0,80 pada Tahun 2020. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan konsumsi akhir rumah tangga sementara nilai PMTB mengalami penurunan.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Surakarta untuk pemenuhan konsumsi akhir rumah tangga masih kurang dari 1 (satu) dibandingkan dengan investasi fisik (PMTB). Atau dapat dikatakan bahwa pemerataan pembangunan secara sosial masih kurang dibandingkan dengan pemerataan pembangunan secara fisik.



#### D. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi Rumah Tangga, LNPRT, dan Pemerintah. Walaupun ketiga komponen tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 15. Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020**

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Milyar Rupiah)					
a. Rumah tangga	19 200,58	20 827,42	22 587,79	24 210,99	24 540,85
b. LNPRT	230,09	250,11	278,35	312,57	291,07
c. Pemerintah	4 386,33	4 703,11	4 873,87	5 090,82	4 566,2
<b>Jumlah</b>	<b>23 817,00</b>	<b>25 780,64</b>	<b>27 740,01</b>	<b>29 614,39</b>	<b>29 398,11</b>
PDRB (ADHB) (Milyar Rupiah)	37 771,07	41 042,34	44 429,82	48 002,28	47 644,56
Proporsi	63,06	62,81	62,44	61,69	61,70

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 15 berikut ini dapat dijelaskan bahwa pada periode Tahun 2016 - 2020, lebih dari 61 persen produk barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kota Surakarta digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Proporsi ini mulai menurun pada Tahun 2017 hingga Tahun 2019 dan naik kembali pada Tahun 2020.

Untuk PMTB, Perubahan Inventori, dan ekspor menjadi produk yang tidak digunakan sebagai konsumsi akhir, memiliki peran yang relatif kecil dengan besaran proporsi sekitar kurang dari 36 persen.

#### E. PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik (Kota Surakarta), tetapi diperdagangkan ke luar Kota Surakarta. Untuk menghasilkan produk yang diekspor dihitung menggunakan kapital (PMTB). Sementara itu sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang-barang kapital.

Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB). Rasio ekspor terhadap PMTB Kota Surakarta termuat dalam Tabel 16.

Dari Tabel 16 didapatkan total nilai ekspor Kota Surakarta lebih kecil dibanding nilai PMTB, sehingga rasionya kurang dari 1. Rata-rata rasio ekspor terhadap PMTB selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 0,52. Nilai rasio ini cenderung berfluktuasi dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, karena perkembangan nilai ekspor yang berbeda dengan perkembangan nilai PMTB.

**Tabel 16. Rasio Ekspor terhadap PMTB  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020**

<b>U r a i a n</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor (ADHB) (Milyar Rupiah)	12 318,89	14 343,57	17 100,64	18 444,11	15 662,37
Total Nilai PMTB (ADHB) (Milyar Rupiah)	25 547,16	27 798,72	31 167,73	33 871,41	30 617,43
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,48	0,52	0,55	0,54	0,51

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 rasio ekspor terhadap PMTB mengalami peningkatan tetapi mulai menurun pada Tahun 2019. Terjadinya penurunan rasio nilai ekspor terhadap PMTB pada Tahun 2019 diantaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor. Sementara itu penurunan rasio pada Tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor yang lebih pesat meskipun nilai PMTB juga mengalami penurunan.

Tabel 16 juga menjelaskan bahwa nilai ekspor Kota Surakarta sampai dengan Tahun 2020 belum sebesar nilai PMTB. Dan untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Sehingga diharapkan dengan nilai PMTB yang tinggi sampai dengan saat ini dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan nilai ekspor di tahun-tahun ke depannya.

## **F. PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR**

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data rasio tersebut dapat menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan dari luar Kota Surakarta. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi dan sebaliknya.

Pada Tabel 17 berikut ini bisa didapatkan rata-rata rasio PDRB terhadap impor Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 sebesar 1,51. Penurunan rasio pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 menunjukkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Kota Surakarta terhadap impor.

**Tabel 17. Rasio PDRB terhadap Impor  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 – 2020**

<b>U r a i a n</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) ( <i>Milyar Rupiah</i> )	37 771,07	41 042,34	44 429,82	48 002,28	47 644,56
Total Impor (ADHB) ( <i>Juta Rp</i> )	23 999,83	27 023,14	31 893,70	34 219,65	28 333,41
Rasio PDRB terhadap Impor	1,57	1,52	1,39	1,40	1,68

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Pada Tahun 2019 rasio meningkat menjadi 1,40 yang mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat mulai tercukupi dengan produk-produk yang dihasilkan sendiri oleh Kota Surakarta. Sementara itu peningkatan rasio pada Tahun 2020 terjadi karena adanya kontrol (pembatasan) terhadap impor akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemi COVID-19.

## G. KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Tingkat ketergantungan (ketidakseimbangan) ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*). Sisi keseimbangan penyediaan (*supply*) dan permintaan akhir (*demand*) tersaji dalam Tabel 18.

**Tabel 18. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020**

<b>U r a i a n</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan PDRB (ADHB) ( <i>Milyar Rupiah</i> )	37 771,07	41 042,34	44 429,82	48 002,28	47 644,56
Persentase Penyediaan PDRB (ADHB) (%)	61,15	60,30	58,21	58,38	62,71
Total Nilai Impor ADHB ( <i>Milyar Rupiah</i> )	23 999,83	27 023,14	31 893,70	34 219,65	28 333,41
Persentase Nilai Impor ADHB (%)	38,85	39,70	41,79	41,62	37,29
Total Permintaan Akhir ( <i>Milyar Rupiah</i> )	61 770,90	68 065,48	76 323,51	82 221,92	75 977,98
Persentase Permintaan Akhir (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

Dari Tabel 18 dapat diketahui bahwa pada periode Tahun 2016 – 2020 Kota Surakarta masih bergantung terhadap produk dari luar wilayah Kota Surakarta sebesar 37,29 - 41,79 persen untuk memenuhi permintaan akhir domestiknya. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 58,21 - 62,71 persen dari hasil produksi domestik.

Sementara itu nilai penyediaan produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik sebesar 37,77 triliun rupiah pada Tahun 2016 dan terus meningkat menjadi 48,00 triliun rupiah pada Tahun 2019 kemudian turun menjadi senilai 47,64 triliun rupiah pada Tahun 2020. Sehingga nilai dari berbagai produk barang dan jasa yang diimpor merupakan nilai dari kebutuhan masyarakat Kota Surakarta yang tidak dapat dicukupi oleh hasil produksi domestik pada tahun yang bersesuaian.

<https://surakartakota.bps.go.id>

***BAB V***

***PENUTUP***

<https://surakartakota.bps.go.id>

PDRB Kota Surakarta menurut pengeluaran Tahun 2016 - 2020 pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu PDRB pengeluaran berdasarkan ADHB dan PDRB pengeluaran ADHK. Penjelasan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. PDRB menurut pengeluaran Tahun 2016 - 2020 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Surakarta pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah Rumah Tangga, Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), Pemerintah, dan Perusahaan;
2. Nominal PDRB Kota Surakarta Tahun 2020 berdasarkan ADHB mencapai 47,644 triliun rupiah. Dari nilai tersebut sebesar 61,70 persen digunakan untuk konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga yang mencapai 51,51 persen, konsumsi pemerintah sebesar 9,58 persen, dan konsumsi LNPR sebesar 0,61 persen. Dengan peranan rumah tangga yang sangat dominan dalam konsumsi akhir, tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan komponen ini juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta sebesar -1,74 persen dan 0,14 persennya bersumber dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga;
3. Peranan investasi dalam perekonomian selalu merupakan *issue* yang menarik untuk diulas, karena investasi dalam bentuk kapital/modal fisik akan digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi yang keluarannya adalah output. Peranan investasi dalam PDRB Pengeluaran Kota Surakarta dapat didekati dari proporsi PMTB dalam PDRB. Proporsi PMTB selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 berada pada kisaran 64,26 - 70,56 persen, atau dapat dikatakan peranan investasi dalam perekonomian Kota Surakarta sebesar 70,56 persen pada Tahun 2019 dan menurun menjadi 64,26 persen pada Tahun 2020;
4. PDRB Kota Surakarta pada Tahun 2020 baru memenuhi 62,71 persen dari total permintaan akhir, sehingga kekurangan *supply* diperoleh dari impor. Impor yang dimaksud disini adalah impor dari luar Kota Surakarta. Peranan impor dalam perekonomian Kota Surakarta cukup besar dan nilainya meningkat dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 dan menurun di Tahun 2020;
5. Dari seluruh data dan ulasan yang ditampilkan dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh para pengguna data untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan, evaluasi, dan berbagai analisis ekonomi lainnya. Data-data yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dengan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan bahkan Neraca Arus Dana.

# ***LAMPIRAN***

<https://surakartakota.bps.go.id>

**Lampiran 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020  
(Milyar Rupiah)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	19 200,58	20 827,42	22 587,79	24 210,99	24 540,85
2. Konsumsi LNPRT	230,09	250,11	278,35	312,57	291,07
3. Konsumsi Pemerintah	4 386,33	4 703,11	4 873,87	5 090,82	4 566,20
4. PMTB	25 547,16	27 798,72	31 167,73	33 871,41	30 617,43
5. Perubahan Inventori	87,85	142,55	315,14	292,01	300,06
6. Ekspor	12 318,89	14 343,57	17 100,64	18 444,11	15 662,37
7. Impor	23 999,83	27 023,14	31 893,70	34 219,65	28 333,41
<b>Total PDRB</b>	<b>37 771,07</b>	<b>41 042,34</b>	<b>44 429,82</b>	<b>48 002,28</b>	<b>47 644,56</b>

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

**Lampiran 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020  
(Milyar Rupiah)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	14 612,12	15 358,02	16 270,07	16 979,00	17 003,15
2. Konsumsi LNPRT	158,42	167,68	182,14	200,37	181,79
3. Konsumsi Pemerintah	2 879,22	2 995,65	3 048,52	3 158,64	2 854,99
4. PMTB	19 387,62	20 671,44	22 507,26	23 634,47	21 347,62
5. Perubahan Inventori	118,90	120,66	122,25	123,07	230,16
6. Ekspor	8 310,85	8 978,80	9 947,39	10 505,19	9 224,98
7. Impor	15 491,27	16 606,77	18 571,73	19 157,89	16 015,51
<b>Total PDRB</b>	<b>29 975,87</b>	<b>31 685,48</b>	<b>33 505,90</b>	<b>35 442,86</b>	<b>34 827,19</b>

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara



**Lampiran 3. Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Pengeluaran  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020  
(Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	50,83	50,75	50,84	50,44	51,51
2. Konsumsi LNPRT	0,61	0,61	0,63	0,65	0,61
3. Konsumsi Pemerintah	11,61	11,46	10,97	10,61	9,58
4. PMTB	67,64	67,73	70,15	70,56	64,26
5. Perubahan Inventori	0,23	0,35	0,71	0,61	0,63
6. Ekspor	32,61	34,95	38,49	38,42	32,87
7. Impor	63,54	65,84	71,78	71,29	59,47
<b>Total PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

**Lampiran 4. Distribusi PDRB ADH Konstan 2010 Menurut  
Pengeluaran  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020  
(Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	48,75	48,47	48,56	47,91	48,82
2. Konsumsi LNPRT	0,53	0,53	0,54	0,57	0,52
3. Konsumsi Pemerintah	9,61	9,45	9,10	8,91	8,20
4. PMTB	64,68	65,24	67,17	66,68	61,30
5. Perubahan Inventori	0,40	0,38	0,36	0,35	0,66
6. Ekspor	27,73	28,34	29,69	29,64	26,49
7. Impor	51,68	52,41	55,43	54,05	45,99
<b>Total PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

**Lampiran 5. Laju Pertumbuhan PDRB ADH Berlaku Menurut Pengeluaran  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020  
(Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	8,94	5,73	8,47	8,45	7,19	1,36
2. Konsumsi LNPRRT	5,86	8,90	8,70	11,29	12,30	-6,88
3. Konsumsi Pemerintah	12,54	0,26	7,22	3,63	4,45	-10,31
4. PMTB	8,02	9,20	8,81	12,12	8,67	-9,61
5. Perubahan Inventori	-72,85	-60,32	62,27	121,07	-7,34	2,76
6. Ekspor	4,93	2,86	16,44	19,22	7,86	-15,08
7. Impor	3,49	2,70	12,60	18,02	7,29	-17,20
<b>Total PDRB</b>	<b>9,07</b>	<b>8,01</b>	<b>8,66</b>	<b>8,25</b>	<b>8,04</b>	<b>-0,75</b>

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

**Lampiran 6. Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan 2010 Menurut  
Pengeluaran  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020  
(Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,81	5,10	5,94	4,36	0,14
2. Konsumsi LNPRRT	5,42	5,85	8,62	10,01	-9,27
3. Konsumsi Pemerintah	-2,96	4,04	1,76	3,61	-9,61
4. PMTB	5,98	6,62	8,88	5,01	-9,68
5. Perubahan Inventori	10,64	1,48	1,32	0,67	87,02
6. Ekspor	2,09	8,04	10,79	5,61	-12,19
7. Impor	1,37	7,20	11,83	3,16	-16,40
<b>Total PDRB</b>	<b>5,35</b>	<b>5,70</b>	<b>5,75</b>	<b>5,78</b>	<b>-1,74</b>

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

**Lampiran 7. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020  
(Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2,61	2,76	2,79	2,77	-0,85
2. Konsumsi LNPRT	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,01
3. Konsumsi Pemerintah	0,51	0,54	0,52	0,52	-0,14
4. PMTB	3,46	3,72	3,86	3,85	-1,06
5. Perubahan Inventori	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,01
6. Ekspor	1,48	1,62	1,71	1,71	-0,46
7. Impor	2,77	2,99	3,18	3,12	-0,80
<b>Total PDRB</b>	<b>5,35</b>	<b>5,70</b>	<b>5,75</b>	<b>5,78</b>	<b>-1,74</b>

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

**Lampiran 8. Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020  
(2010 = 100)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	131,40	135,61	138,83	142,59	144,33
2. Konsumsi LNPRT	145,24	149,15	152,82	156,00	160,11
3. Konsumsi Pemerintah	152,34	157,00	159,88	161,17	159,94
4. PMTB	131,77	134,48	138,48	143,31	143,42
5. Perubahan Inventori	73,88	118,14	257,79	237,28	130,37
6. Ekspor	148,23	159,75	171,91	175,57	169,78
7. Impor	154,92	162,72	171,73	178,62	176,91
<b>Total PDRB</b>	<b>126,00</b>	<b>129,53</b>	<b>132,60</b>	<b>135,44</b>	<b>136,80</b>

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

**Lampiran 9. Laju Implisit PDRB Menurut Pengeluaran  
Kota Surakarta  
Tahun 2016 - 2020  
(Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019*</b>	<b>2020**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1,86	3,20	2,37	2,71	1,22
2. Konsumsi LNPRT	3,31	2,70	2,46	2,08	2,63
3. Konsumsi Pemerintah	3,31	3,05	1,83	0,81	-0,77
4. PMTB	3,04	2,06	2,97	3,49	0,08
5. Perubahan Inventori	-64,14	59,91	118,20	-7,95	-45,06
6. Ekspor	0,75	7,77	7,61	2,13	-3,30
7. Impor	1,31	5,03	5,54	4,01	-0,96
<b>Total PDRB</b>	<b>2,52</b>	<b>2,80</b>	<b>2,37</b>	<b>2,14</b>	<b>1,01</b>

\*Angka Sementara \*\*Angka Sangat Sementara

# *DAFTAR PUSTAKA*

<https://surakartakota.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik, *Booklet Perubahan Tahun Dasar PDB Berbasis SNA 2008*, Jakarta, 2014.

\_\_\_\_\_, *Pedoman Pembuatan Publikasi BPS*, Jakarta, 2016.

\_\_\_\_\_, *Pedoman Penyusunan PDRB Kabupaten/Kota Tahun Dasar 2010 Menurut Pengeluaran*, Jakarta, 2014.

\_\_\_\_\_, *Produk Domestik Bruto menurut Penggunaan 2008-2013*, Jakarta, 2014

\_\_\_\_\_, *Sistem Neraca Nasional 2008*, Jakarta, 2013.

**BPS Kota Surakarta**, *Surakarta dalam Angka*, berbagai seri, Surakarta.

**BPS Provinsi Jawa Tengah**, *Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.

\_\_\_\_\_, *Jawa Tengah dalam Angka*, berbagai seri, Semarang.

\_\_\_\_\_, *Statistik Air Bersih Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.

\_\_\_\_\_, *Statistik Ekspor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.

\_\_\_\_\_, *Statistik Impor Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.

\_\_\_\_\_, *Statistik Industri Manufaktur Besar Sedang Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.

\_\_\_\_\_, *Statistik Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.

\_\_\_\_\_, *Tabel Input Output Jawa Tengah*, berbagai seri, Semarang.



Sensus  
Penduduk  
2020

#MencatatIndonesia

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://surakartakota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURAKARTA**

Jln. P. Lumban Tobing No. 6, Kel. Setabelan,  
Kec. Banjarsari, Kota Surakarta  
Telp./Fax. (0271) 635428  
Email: bps3372@bps.go.id

ISSN 2776-690X

